

EFEKTIVITAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BAWASLU KOTA SURABAYA DALAM PEMENUHAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BAGI MASYARAKAT

Oleh:

Maulidia

(202020100091)

Dosen Pembimbing :

Lailul Mursyidah, S.AP.,M.AP

Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Februari, 2024



Pendahuluan

PPID Bawaslu Kota Surabaya

Semua lembaga Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi secara terbuka. Salah satunya yang mengimplementasikan prinsip akses terbuka terhadap Informasi Publik ialah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Mengenai pelaksanaan layanan informasi secara terbuka, Bawaslu Kota Surabaya telah mengeluarkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Surabaya terkait dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kota Surabaya. PPID ialah Pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang pendokumentasian, penyimpanan dan penyedia layanan informasi publik di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kota/Kabupaten.

Keterbukaan Informasi Publik

Di era modernisasi saat ini, khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi dapat memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat luas secara cepat, mudah, dan akurat. Ketersediaan informasi publik juga menjadi salah satu faktor krusial dalam membantu Pemerintah dalam melaksanakan tata kelola Pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi bagi masyarakat tidak dapat dibatasi dan dihindari karena Indonesia telah memasuki era informasi dalam ranah demokrasi, dimana membutuhkan masyarakat luas dalam mendirikan Negara.

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
- Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 yang berisikan Standarisasi Pelayanan Informasi Publik.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 yang mengatur mengenai Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik pada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota

Keterbukaan Informasi Publik



Pendahuluan

Didalam PPID Bawaslu Kota Surabaya terdapat berbagai jenis informasi publik seperti, secara berkala, setiap saat, serta-merta dan dikecualikan. Dengan adanya keterbukaan informasi publik melalui PPID ini dapat mempermudah masyarakat untuk mengetahui atau memperoleh informasi secara transparan. Namun, kenyataannya masih terdapat beberapa kendala sehingga dalam pengelolaan informasi yang ada belum dilaksanakan secara optimal. Dari kendala yang ada seperti, masih terdapat rendahnya permohonan informasi dikarenakan kurangnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Selain itu juga kurangnya kesadaran diri pada setiap unit pelayanan informasi dalam menyerahkan data dan informasi yang dikuasai berupa digitalisasi dengan baik dan tertata rapi kepada pihak PPID yang menimbulkan terhambatnya dalam pemutakhiran data dan *update* an pada *website*.

Tabel 1. Jenis-Jenis Informasi Publik

No.	Jenis Informasi Publik	Sub Informasi Publik	2021	2022	2023
1.	Berkala	Informasi Kegiatan dan Kinerja Bawaslu	Terlaksana	Belum Terlaksana	Belum Terlaksana
		Laporan Keuangan	Terlaksana	Terlaksana	Belum Terlaksana
		Organisasi Administrasi dan Kepegawaian	Terlaksana	Terlaksana	Belum Terlaksana
		Pelayanan Informasi Publik	Terlaksana	Belum Terlaksana	Belum Terlaksana
2.	Serta-Merta	-	-	Belum Terlaksana	
3.	Setiap Saat	-	Terlaksana	Terlaksana	
4.	Dikecualikan	-	Terlaksana	Terlaksana	

Permasalahan yang ditemui :

1. Masih terdapat rendahnya permohonan informasi dikarenakan kurangnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan menimbulkan pemahaman masyarakat mengenai adanya keterbukaan informasi publik yang masih kurang, sehingga permintaan informasi masih relatif sedikit atau bahkan tidak ada.



Penelitian Terdahulu

Ira Novita (2019)

“Peranan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Pelayanan Serta Penyediaan Informasi Publik Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan PPID di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh sebagai administrator, fasilitator, operator sistem informasi dan evaluator sudah berjalan cukup baik, namun masih terdapat hambatan yang terjadi seperti kurangnya pemahaman pemohon tentang informasi publik, kurangnya kerjasama PPID dengan staff bagian dan sarana pelayanan yang belum memadai dalam memberikan layanan informasi publik

Isnaini Muallidin, Dewi Sekar Kencono, Coni Wanprala

(2020) “Kualitas layanan keterbukaan informasi publik berbasis webportal pada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Kabupaten Sleman Tahun 2019”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kualitas informasi telah memiliki akurasi tergolong baik, namun dalam *updating information* masih tergolong kurang *update*, jika dalam kualitas layanan dan kualitas teknis masih tergolong kurang baik dikarenakan kinerja *website* yang masih lambat dan kurangnya daya tanggap pengelola membuat proses permohonan informasi memakan waktu cukup panjang.

Ni Made Lestari, Ida Ayu Putu Sri Widnyani dan Nyoman Diah Utari Dewi 2023 (2023)

“Efektivitas Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik di KPU Kabupaten Karangasem”

Hasil penelitian menunjukkan pada indikator pencapaian tujuan sudah efektif, namun jika dilihat dari indikator integritas dan adaptasi belum sepenuhnya efektif dikarenakan masih terdapat hambatan seperti, ruangan pelayanan kurang representatif, masih kurangnya SDM yang mampu mengelola PPID, ketersediaan anggaran untuk mensosialisasikan PPID belum memadai dan sarana prasarana e-PPID berbasis website belum memadai

Metode Penelitian



JENIS PENELITIAN

Deskriptif Kualitatif



FOKUS PENELITIAN

Fokus penelitian ini didasarkan pada teori Efektivitas Dunchan dalam Steers:

1. Pencapaian Tujuan
2. Integrasi
3. Adaptasi



LOKASI PENELITIAN

Bawaslu Kota Surabaya



TEKNIK PENGUMPULAN DATA

- ❖ Wawancara
- ❖ Observasi
- ❖ Dokumentasi



TEKNIK PENENTUAN INFORMAN

Purposive Sampling



SUMBER DATA

- ❖ Data Primer
- ❖ Data Sekunder



TEKNIK ANALISIS DATA :

Miles and Huberman

- ❖ Pengumpulan Data
- ❖ Reduksi Data
- ❖ Penyajian Data
- ❖ Penarikan Kesimpulan

Hasil dan Pembahasan

A. Pencapaian Tujuan

Tujuan dari adanya *website* PPID ialah guna mewujudkan keterbukaan informasi publik bagi masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang memiliki salah satu tujuan yaitu meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik sehingga dapat memberikan layanan informasi secara prima, transparan dan akurat.

Tabel 2. Kegiatan PPID

No.	Kegiatan	Tahun	Anggaran	Realisasi
1	Pengoperasian Website	2021	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
2	Pembaharuan Tampilan Website	2022	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
3	-	2023	-	-

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian pada indikator pencapaian tujuan dapat dikatakan berhasil dikarenakan Bawaslu Kota Surabaya telah menerapkan layanan keterbukaan informasi publik sudah sesuai dengan sasaran utamanya yakni masyarakat serta dalam segi tugas, pokok dan wewenang PPID sudah sesuai menurut Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019, dimana Bawaslu Kota Surabaya telah memberikan layanan informasi kepada masyarakat hingga saat ini seperti, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, mengamankan informasi dan memberikan layanan informasi publik dengan cepat, tepat dan akurat. Dengan demikian, Bawaslu Kota Surabaya akan terus berupaya dalam melakukan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi pada PPID secara bertahap untuk mencapai tujuan yang lebih konkret dan dapat lebih dipahami serta dimengerti oleh masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

B. Integrasi

Sosialisasi memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan program atau kebijakan yang sedang dilaksanakan. Bawaslu Kota Surabaya telah memberikan pengenalan *website* PPID kepada para staff utamanya petugas pelayanan informasi mengenai penggunaan dan pengelolaan *website* PPID. Selain itu, Bawaslu Kota Surabaya menjadi pihak yang berwenang untuk memberikan sosialisasi tentang mengenalkan *website* PPID kepada masyarakat. Dalam kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan masih belum maksimal dikarenakan sosialisasi hanya sebatas dengan memanfaatkan kegiatan Bawaslu seperti kegiatan pengawasan, menginformasikan dari mulut ke mulut dan platform online yang dimilikinya. Hal tersebut yang membuat permohonan informasi pada *website* tergolong minim bahkan tidak ada. Sosialisasi yang kurang dilakukan juga dapat menyebabkan pengelolaan suatu program menjadi tidak efektif akibat masyarakat yang tidak mengetahui maupun memahami tentang keberadaan PPID. Dengan demikian, diharapkan Bawaslu Kota Surabaya dapat melakukan kegiatan sosialisasi yang dikhususkan untuk PPID secara merata agar semua masyarakat mengetahui dan dapat berpartisipasi aktif dalam memanfaatkan keterbukaan informasi publik.

Hasil dan Pembahasan



Hasil dan Pembahasan

C. Adaptasi

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator adaptasi mengenai sumber daya manusia dikatakan sudah menyesuaikan diri dengan adanya *website* PPID dikarenakan semua staff akan terlibat untuk memberikan data dan informasi sesuai pada divisi masing-masing, Namun terdapat hambatan yang terjadi seperti, beban tugas yang dikerjakan dari semua divisi tergolong tidak sedikit sehingga untuk memenuhi dokumen PPID yang akan di *upload* pada *website* PPID masih terdapat adanya keterlambatan dalam pengumpulan kepada pihak PPID. Tetapi, jika sumber daya manusia yang mengoperasikan *website* PPID sudah sesuai dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang teknologi.

Hasil dan Pembahasan

Selain, sumber daya manusia dalam penerapan *website* PPID juga membutuhkan penunjang yakni sarana dan prasarana yang sudah memadai sesuai kebutuhan lapangan baik untuk para staff maupun masyarakat, sehingga mereka dapat merasakan kemudahan dalam proses layanan informasi publik baik melalui *online* maupun *offline*. Selain operator yang mumpuni, penerapan *website* PPID juga pastinya tidak terlepas dengan sarana dan prasarana yang mendukung berjalannya *website* tersebut.

No.	Jenis	Jumlah
1.	Komputer	1 Unit, 24 inch
2.	Wifi	1 Unit dengan kapasitas 100 mb
3.	Meja	1 Unit
4.	Kursi	2 Unit
5.	Printer	1 Unit
6.	Scanning	1 Unit

Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan mengenai Efektivitas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kota Surabaya Dalam Pemenuhan Keterbukaan Informasi Publik Bagi Masyarakat yang dilakukan peneliti dengan berpacu pada Teori Efektivitas oleh Dunchan dalam Steers, maka dapat ditarik kesimpulan :

Pencapaian tujuan dari efektivitas PPID Bawaslu Kota Surabaya dapat dikatakan sesuai dikarenakan Bawaslu Kota Surabaya telah memberikan layanan informasi publik secara luas dan terbuka kepada masyarakat melalui *website* PPID yang juga didasari dari dasar hukum mengenai keterbukaan informasi publik. Bawaslu Kota Surabaya akan terus berupaya dalam melakukan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi pada PPID secara bertahap untuk mencapai tujuan yang lebih konkret dan lebih dapat dipahami serta dimengerti oleh masyarakat.

Kesimpulan

Integrasi, dapat dilihat bahwa dalam hal sosialisasi dirasa belum efektif dikarenakan sosialisasi yang telah dilakukan dengan cara menyisipkan informasi terkait PPID dalam kegiatan Bawaslu yang tidak dikhususkan untuk PPID, baik melalui sosialisasi secara langsung maupun memanfaatkan platform *online* yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Surabaya. Hal tersebut menjadikan masyarakat banyak yang belum mengetahui tentang keberadaan PPID sebagai salah satu sarana layanan informasi publik.

Adaptasi, dapat dilihat bahwa dalam sumber daya manusia dikatakan sudah menyesuaikan diri dengan adanya *website* PPID serta petugas pelayanan informasi yang dipastikan berkompeten dan menguasai dalam bidang teknologi, Namun masih adanya hambatan yang terjadi seperti, beban tugas yang dikerjakan dari semua divisi tergolong tidak sedikit sehingga untuk memenuhi dokumen PPID terdapat keterlambatan dalam pengumpulan kepada pihak PPID. Jika pada sarana dan prasarana sudah memadai dengan memberikan fasilitas kepada staff maupun masyarakat sesuai dengan kebutuhan di lapangan, sehingga dapat mempermudah dalam memberikan layanan informasi publik baik melalui secara *online* maupun secara *offline* di kantor Bawaslu Kota Surabaya.

REFERENSI

- [1] C. Berliani, R. Yulianti, O. Supriyadi, P. Studi, and A. Publik, "Implementation Of Public Information," *JianE (Jurnal Ilmu Adm. Negara)*, vol. 4, no. 1, pp. 128–142, 2016.
- [2] D. Trijayanto and I. A. Idrus, "Peran PPID Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik," *Ikraith-Humaniora2*, vol. 3, no. 1, pp. 107–117, 2019.
- [3] E. RAMON, "Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau," 2021, [Online]. Available: <https://repository.uir.ac.id/15168/1/191022214.pdf>
- [4] I. Novita, "Peranan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Pelayanan Informasi Publik Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh." UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019..
- [5] I. Muallidin, D. S. Kencono, and C. Wanprala, "Kualitas Layanan KIP Berbasis Webportal Pada PPID Kabupaten Sleman Tahun 2019," *J. Stud. Kepemerintahan*, vol. 3, no. 1, pp. 55–66, 2020.
- [6] M. Sari and R. Mulyadi, "Kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bungo dalam Pemenuhan Ketersediaan Informasi Publik," *Transparansi J. Ilm. Ilmu Adm.*, vol. 3, no. 2, pp. 109–118, 2020, doi: 10.31334/transparansi.v3i2.1141.
- [7] N. M. Lestari, I. Ayu, P. Sri, N. Diah, and U. Dewi, "Efektivitas Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik di KPU Kabupaten Karangasem," vol. 3, pp. 76–82, 2023.
- [8] Komisi Informasi Pusat, "Laporan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018," no. 1, 2018.
- [9] P. D. Sugiono, "Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif.pdf," *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. p. 12, 2014.
- [10] C. N. Sari, M. Heriyanto, and Z. Rusli, "Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga," *JIANA J. Ilmu Adm. Negara*, vol. 15, pp. 135–141, 2018.
- [11] K. Baria, "Efektivitas Pelayanan Kartu Macca Di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng," *Jur. Ilmu Adm. Negara Fak. Ilmu Sos. Dan Ilmu Polit. Unuversitas Muhammadiyah Makassar 2019*, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2019, [Online]. Available: www.journal.uta45jakarta.ac.id
- [12] L. L. A. Alou, D. M. Liando, and J. P. Lengkong, "Efektivitas Program Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara," *J. Pengelolaan Sumberd. Pembang.*, vol. 1, no. 1, pp. 81–93, 2021, [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/psp/article/view/36450>
- [13] A. A. Pramesti and Y. Mardhatillah, "Efektivitas Aplikasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dalam Pelayanan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi," *J. Teknol. dan Komun. Pemerintah.*, vol. 5, no. 1, pp. 62–86, 2023, doi: 10.33701/jtkp.v5i1.2851.
- [14] F. Ekonomika, D. A. N. Bisnis, and U. Diponegoro, "PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus Desa Balesari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung) PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus Desa Balesari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung)," 2017.
- [15] S. S. Deisy Angreini Lahutung and F. Pengemanan, "Efektivitas Program Pajak Online Terpadu (Ponter) Dalam Rangka Inovasi Pelayanan Publik," *Governance*, vol. 1, no. 1, pp. 1–8, 2021.



Terima Kasih